

**LAPORAN**  
**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2025**  
**(LKj-IP SKPD)**



**DISUSUN OLEH:**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**TAHUN 2026**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas Taufik dan Hidayah-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 dapat di selesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan PERPRES No.29 TAHUN 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai kewajiban yang harus dijalani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah di dalam kapasitasnya sebagai salah satu Instansi / Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Metode dan sistematika Laporan mengacu pada Permenpanrb No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa obyektifitas dan rasionalitas laporan sebagai prasyarat utama agar laporan dapat memberikan manfaat sesuai dengan visi dan misi Sistem Akuntabilitas dalam mewujudkan Good Governance masih belum maksimal.

Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dan sesuai ipihak yang brkepentingan serta berkompeten dengan system laporan ini sangat kami harapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu penyusunan ini kami sampaikan terimakasih.

**Praya , Januari 2026**

**Kepala Dinas,**

**MUHAMMAD SUPRIADDIN, ST.**

**NIP. 197512212008011013**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iii</b>
<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Tugas pokok dan fungsi OPD.....	1
2. Data kepegawaian.....	2
3. Struktur Organisasi.....	5
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
1. Rencana Strategis.....	6
2. Rencana Kerja Tahunan.....	11
3. Indikator Kinerja Utama.....	12
4. Perjanjian kinerja Perangkat Daerah tahun 2022.....	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja.....	14
2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran.....	15
I. Sasaran 1 Tersedianya Rumah layak Huni Bagi Masyarakat Kabupaten Lombok Tengan	
II. Sasaran 2 Tersedianya Kawasan Permukiman yang memadai/berkualitas	
III. Sasaran 3 Tersedianya tanah dan lahan untuk pembangunan fasilitas umum	
3. Evaluasi Pencapaian Kinerja, Pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah.....	20
4. Akuntabilitas Keuangan.....	22
<b>BAB IV PENUTUP</b>	

## **LAMPIRAN**

1. DOKUMEN DOKUMEN PENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA, PENCAPAIAN SASARAN DALAM PERJANJIAN KINERJA
2. TABEL HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANA

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029. LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2025-2029 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni	67,81%	68,48%	100
Tersedianya Kawasan Permukiman Yang Memadai/Berkualitas	Persentase Kawasan Permukiman Yang Berkualitas	29,99%	36,39%	100
Tersedianya Tanah dan Lahan yang sesuai dengan kriteria untuk	Persentase Penyediaan Tanah dan Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100 %	100%	100

pembangunan fasilitas umum				
----------------------------	--	--	--	--

Dari ilustrasi tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat kabupaten Lombok Tengah dengan indikator kinerja Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni diatas target yang ditetapkan, yaitu 100% dari target 67,81% hal ini tercapai berkat kolaborasi yang dilakukan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, adanya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Penanganan RTLH dari Pemerintah Provinsi dan ada juga Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dar BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah, sehingga pada tahun ini ada 792 unit Rumah yang mendapatkan Perbaikan.

Untuk sasaran strategis Tersedianya Kawasan Permukiman Yang Memadai/Berkualitas dengan indikator kinerja Persentase Kawasan Permukiman yang Berkualitas capaiannya sebesar 36,39% dari target 29,99 % atau realisasi sebesar 100% dari target namun pencapaian ini didominasi kinerja Perbaikan PSdan Belum ada Perubahan signifikan pada Pemugaran/Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh, Sehingga Kedepannya Kami akan Mendorong Pembangunan infrastruktur yang berkeselimbangan. Kemudian untuk sasaran strategis Tersedianya tanah dan lahan yang sesuai dengan kriteria untuk pembangunan fasilitas umum dengan indikator kinerja Persentase Kebutuhan lahan untuk pembangunan fasilitas umum terealisasi sebesar 100% berdasarkan laporan yang telah diterima. dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian untuk sasaran strategis yang telah ditetapkan masih harus ditingkatkan.

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD

#### 1. Kedudukan

Sesuai dengan peraturan bupati nomor 76 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Pembangunan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah, sangat vital yaitu sebagai *stakeholders* dalam Pembangunan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kabupaten Lombok Tengah.

#### 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten *Lombok Tengah* Nomor 7 Tahun 1999 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati *Lombok Tengah* No. 76 Tahun 2021 tentang Rincian tugas fungsi dan tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pembangunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman ;
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan teknis dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dibidang perumahan dan kawasan permukiman;

- d. pelaksanaan administrasi Dinas dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

## **1.2 Data Kepegawaian**

Jumlah Pegawai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2025 adalah sebanyak 67 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

**REGISTER PEGAWAI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
Keadaan : 31 Desember 2025**

NO	NAMA	L/P	Gol	Eselon	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Dikat PIM yang diikuti	Ket
1				II	Kepala Dinas			
2	MUHAMMAD SUKARMAN, ST., M.A.K.	L	IV/b	III	Sekretaris	S2Akuntansi		
3	LALU KA.BENGSUSILA, S.Sos	L	III/d	III	Kepala Bidang Pertanahan	S1Administrasi Negara		
4	MUHAMAD RUSDI, ST., MT.	L	III/d	III	Kepala Bidang Perumahan	S2Magister Teknik		
5	BAIQ CITRA DEWI WIDYANTARI, ST., M.IWM	P	III/d	III	Kepala Bidang Penataan Kawasan permukiman	S2Manajemen	PIM IV	
6	IWAN SATRIADI, S.Sos	L	III/d	IV	Kepala Subbagian umum dan Kepegawaian	S1Administrasi Negara		
7	H. LALU MARZUKI, ST.	L	III/d		Ahli Muda Tata Bangunan Dan Perumahan	S1Teknik Sipil		
8	LENY MARINA KARTIKA, ST.	P	III/d		Ahli Muda Penata Ruang	S1Teknik Planologi		
9	BAIQ EINY SUSANTI, ST.	P	III/d		Ahli Muda Penata Ruang	S1Teknik Planologi		
10	SUMARNATI ZEN, ST.	P	III/d		Ahli Muda Tata Bangunan Dan Perumahan	S1Teknik Sipil		
11	ARIF MARDI WISOWO, ST.	L	III/d		Ahli Muda Tata Bangunan Dan Perumahan	S1Teknik Sipil		
12	JOKO PRASITYO BUDI RETNAWAN, ST.	L	III/d		Ahli Muda Tata Bangunan Dan Perumahan	S1Teknik Mesin		
13	RAHMAT IBRAWAN, ST., MT.	L	III/c		Ahli Muda Tata Bangunan Dan Perumahan	S2Magister Teknik		
14	SUKARSA, ST	L	III/c		Ahli Muda Tata Bangunan Dan Perumahan	S1Teknik Sipil		
15	ROSYDI AHYAR	L	III/c		Ahli Muda Perencana	S1 Teknik Sipil		
16	BAIQ YULIANTI	P	III/d		Analisis Penataan Kawasan	S1Pertanian		
17	EDY JUMHARYONO	L	III/c		Pengolah Data Gaji	S1 Ekonomi		
18	JIN SARTONO	L	III/c		Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	S1Administrasi		
19	BAIQ MUNINGGAR	P	III/c		Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	S1Teknik Sipil		
20	BAIQ MARNI YULIATI	P	III/b		Penata Keuangan	SMK		
21	MASITHA ARIANI	P	III/b		Penata Keuangan	S1Ekonomi		
22	BAIQ NANINGSUDIASMI	P	III/b		Verifikator Data Laporan Keuangan	S1Ekonomi		
23	BAIQ MUSPITA NINGSIH	P	III/b		Analisis Bangunan dan Perumahan	S1Teknik Sipil		
24	MUSTAWAN	L	III/b		Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	STM Bangunan		
25	LALU ADNAN	L	III/b		Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	S2Magister Teknik		
26	MAT MUNAH	P	III/b		Analisis Pemelapasan Hak atas Tanah	Sajana Teknik		
27	LALU SINAIDI	L	III/a		Pengadministrasian Perumahan	S1Ilmu Pemerintahan		
28	BUDI SIDIHARTHA	L	III/a		Pengadm inistrasi Perumahan	S1Ekonomi Pembangunan		
29	LALU KHARISMA DWI PUTRA	L	III/a		Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	S1Ekonomi Pembangunan		
30	ADELIA SALAMUNTI	P	III/a		Analisis Perbaikan Kawasan	S1Teknik Sipil		
31	AKHMAD AMINULLAH	L	III/a		Analisis Perumahan	S1Teknik Sipil		
32	MUHAMMAD AKHISANI TAKWIN	L	III/a		Analisis Perbaikan Kawasan	S1Teknik Sipil		
33	ANTON SUARWO	L	III/a		Analisis Teman	S1Teknik Sipil		
34	DNY FITRIANI	P	III/a		Pengawas Frak Perumahan	S1Teknik Sipil		
35	KUSHARDIAN MUHAMMAD	L	III/a		Pemilakah Mulu Konstruksi	S1Teknik Sipil		
36	LITFI AMALIA PUTRI	P	III/a		Analisis Perumahan	S1Teknik Sipil		
37	BUNDAWATI	P	III/a		Analisis Survey, Pengukuran, dan Pemetaan	S1Teknik Sipil		
38	AGUS HERIVANTO	L	III/d		Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	SNIA IPS		
39	MESIS S	L	III/d		Sandhara	SNIA Pengetahuan Budaya		
40	LALU ACHWAN	L	III/d		Pengelola Kepegawaian	SNIA		
41	WINDARTO	L	III/d		Verifikator Data Laporan Keuangan	STM Mesin Tenaga		
42	HAZRI	L	III/d		Pengadministrasi Umum	SNIA		
43	LALU M. ANWAR	L	III/d		Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	SNIA IPS		
44	BAIQ SRI RAHA YU FEBRIYANTI	P	III/d		Pengadministrasi Keuangan	SNIA IPS		
45	LALU JAYENGRANA	L	III/d		Pengadministrasi Umum	SNIA IPA		
46	BAKRI	L	III/d		Pengadministrasi Umum	SNIA IPS		
47	ELY HANDRAYANI	P	III/d		Pengadministrasi Keuangan	SNIA Perkantoran		
48	ZULHANA	L	III/d		Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	SNK Bangunan		
49	M. ARIF SUHAN	L	III/d		Pengadm inistrasi Perumahan	SNK		
50	ALAN HADI AZHARI	L	III/c		Pengadministrasi Umum	SNIA IPA		
51	SRI UTAMI	P	III/c		Pengadministrasi Keuangan	SNK Bisnis Mmanajemen		
52	LALU ASHA DMIUNANDAR	L	III/c		Pengadministrasi Umum	SNIA IPS		
53	SABRON JAMIL	L	III/c		Pengadministrasi Umum	D3		
54	ALD HENQ SYAIFUTRA	L	III/c		Pengadministrasi Keuangan	D3		
55	DEDY ARMIADI	L	III/b		Pengadministrasi Umum	SNIA IPS		
56	LALU SUBIHAN	L	III/b		Pengadm inistrasi Perumahan	SNIA IPS		
57	RUSNI	L	I/d		Pengemudi	SD		

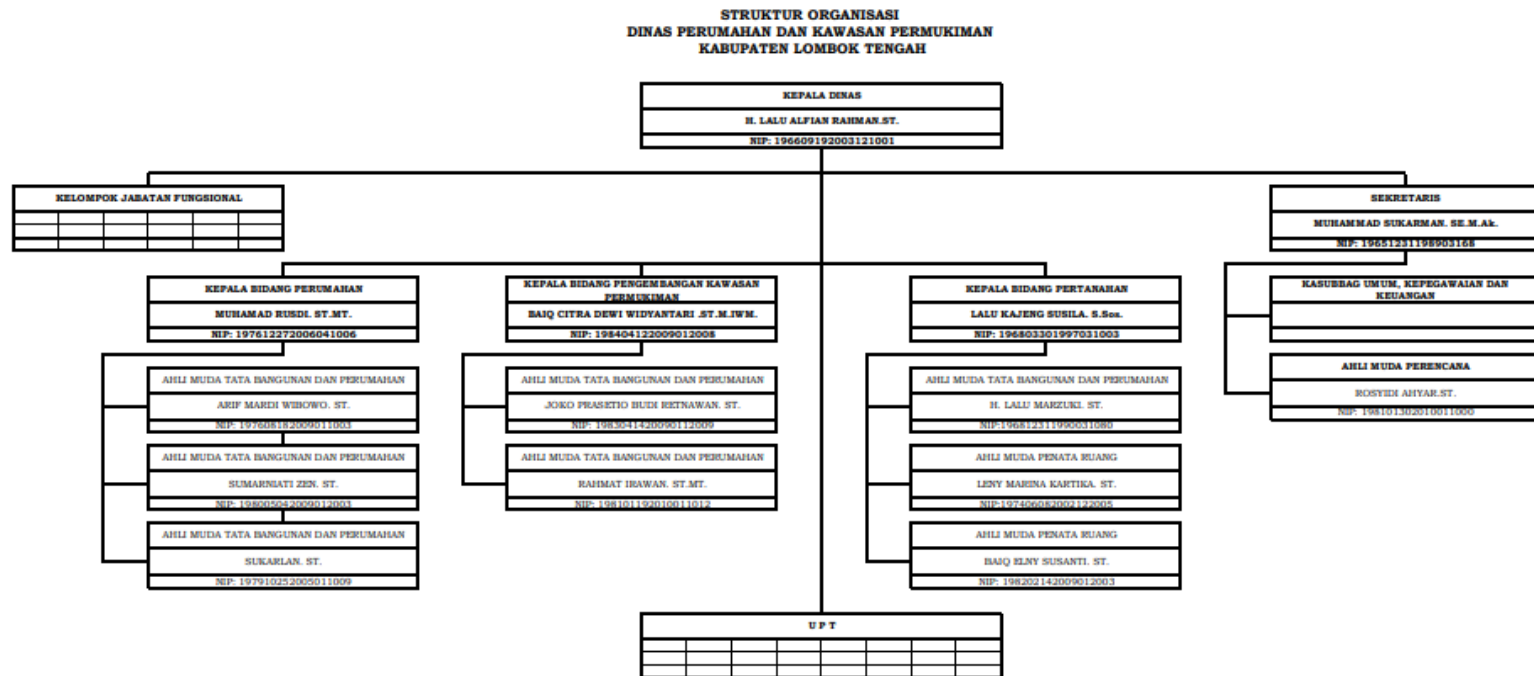
Sumber Daya Manusia pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku dinas teknis untuk membantu Bupati, didalam pelaksanaan tugas – tugas kedinasan telah mempunyai personil yang secara kuantitas telah mencukupi, namun secara kualitas masih belum memadai.

Hal ini terlihat dari jumlah tenaga teknis sebanyak 36 % dan tenaga non teknis 64 % perbandingan jumlah tenaga teknis dan tenaga non teknis ini terbalik, dimana kebutuhan yang ideal adalah 70% tenaga teknis dan 30% tenaga non teknis.



### 1.3 Struktur Organisasi

Lampiran Peraturan Bupati Lombok Tengah  
 Nomor : 36 Tahun 2021  
 Tanggal : 1 Desember 2021  
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah



## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### II.1.RENCANA STRATEGIS

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025-2029 adalah: **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN HARMONIS”**

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Generasi Emas, Sehat dan Cerdas.
2. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Inklusif, Mudah, Tepat Waktu dan Terjangkau.
3. Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan.
4. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah.
5. Mengintegrasikan Nilai Akhlakul Karimah dan Nilai Budaya Luhur dalam Kehidupan Bermasyarakat.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung visi dan misi RPJMD 2025-2029, terkait erat dengan pencapaian misi ke-4 yaitu **” Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah ”**.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah 2025-2029 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah

### II.1.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 – 2029 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah , maka dirumuskan tujuan yaitu : **“Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Serta Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pertanahan ”**

### II.1.2. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah adalah:

1. Tersedianya Kawasan Permukiman yang Memadai/ Berkualitas.
2. Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah
3. Tersedianya tanah dan lahan untuk pembangunan fasilitas umum.

**KETERKAITAN (INTERELASI)**  
**TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Serta Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan Pertanahan.	Tersedianya Kawasan Permukiman Yang Memadai/ Berkualitas	Persentase Kawasan Permukiman Yang Berkualitas
	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni
	Tersedianya Tanah dan Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persentase Pemenuhan Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Umum

**II.1.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komperhensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Serta Terfasilitasinya	1 Tersedianya Kawasan Permukiman Yang Berkualitas	Persentase Kawasan Permukiman yang Berkualitas	Meningkatkan Pembangunan yang berkelanjutan dengan kebijakan peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas	- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan utilitas (PSU) kawasan permukiman yang berkualitas.

penyelenggaraan urusan Pertanahan.				kawasan permukiman	
	2	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni	Menyelenggarakan fungsi monitoring dan evaluasi kegiatan bidang perumahan yang ditunjang dengan kapasitas sumber daya yang memadai	- Pembangunan Baru Rumah Keluarga Miskin - Peningkatan Kualitas Rumah Keluarga Miskin - Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
	3	Tersedianya tanah yang sesuai dengan kriteria untuk pembangunan fasilitas umum		Peningkatan cakupan pelayanan pertanahan melalui peningkatan fasilitas, perencanaan pengembangan dan penganggaran	- Penyediaan tanah untuk infrastruktur publik
	4	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan		Menyelenggarakan fungsi pemerintah dengan akuntabel dan transparan serta memberikan pelayanan administrasi yang terbaik dan maksimal	- Penyediaan layanan administrasi perkantoran - Penyediaan sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik - Dokumen laporan kinerja tepat waktu

#### II.1.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2022, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:

NO	Program/kegiatan	Keterangan (Relisasi Fisik)
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota</b> 1.1 Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.2 Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%  100% 100% 100% 100%
2	<b>Program Pengembangan Perumahan</b> 3.1 Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 3.2 Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan atau Rumah Khusus	100%  100%
3	<b>Program Kawasan Permukiman</b> 5.1 Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	100%
4	<b>Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b> 7.1 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100%
5	<b>Program Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</b> 8.1 Kegiatan Penyelesaian Masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kab/ kota	100%
6	<b>Program Pengelolaan Tanah Kosong</b> 9.1 Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	100%
7	<b>Program Penatagunaan Tanah</b> 5.1 Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	100%

## II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjiankinerja antara lain untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Tersedianya Kawasan Permukiman yang Memadai/Berkualitas	Persentase Kawasan Permukiman yang berkualitas	29,99 %
2	Tersedianya Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Lombok Tengah	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni	67,85 %
3	Tersedianya Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persentase ketersediaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100 %

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>KET</b>
1	Program Pengembangan Perumahan	440.155.245	APBD : DAU
2	Program Kawasan Permukiman	7.852.824.907	APBD : DAU
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	41.983.508.012	APBD : DAU
4	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	1.443.185.511	APBD : DAU
5	Program Pengelolaan Tanah Kosong	65.754.460	APBD : DAU
6	Program Penataagunaan Tanah	10.695.008	APBD : DAU
7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.085.135.410	APBD : DAU
	<b>TOTAL</b>	<b>59.881.258.553,95</b>	

Untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 59.881.258.553** (*Lima Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Realisasi tingkat capaian kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut:

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai 91% s/d 100%	SANGAT TINGGI
2.	Nilai 76% s/d 90%	TINGGI
2.	Nilai 66% s/d 75%	SEDANG
3.	Nilai 51% s/d 65%	RENDAH
4.	Nilai ≤ 55 %	SANGAT RENDAH

### III.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. adapun capaian kinerja sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**a. SASARAN1: Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah.**

Sasaran No 1 tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu:

- a. Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni

**Tabel Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 1 Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi Tahun sebelumnya		Target akhir renstra	Sumber Data
						2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni	Persen	67,81%	68,48 %	100%	1,58 %	2,63%	68,00%	Laporan
RATA-RATA %					100%	KRITERIA tahun 2025: SANGAT TINGGI			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran Tersedianya Rumah Layak Huni bagi Masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah dengan indikator kinerja Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni, pada Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman menghasilkan capaian kinerja sebesar 100% dengan kriteria Baik, hal ini dikarenakan adanya Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait penyediaan Rumah Layak Huni yaitu dengan Kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pihak pihak terkait target yang ditetapkan sebesar 67,81% atau 504 Unit dengan 2 kegiatan utama yaitu penanganan RTLH sebesar 500 unit dengan realisasi sebesar 792 unit dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana sebesar 4 unit, sementara itu untuk rehabilitasi Rumah Korban bencana kita berkoordinasi dengan BPBD, dengan kolaborasi yang intensif maka target kinerja ini bisa tercapai dan pada. Hal ini kami pelajari dari kekurangan- kekurangan capaian pada tahun sebelumnya sehingga kolaborasi ini akan tetap kita jaga agar di tahun Mendatang target yang kami tetapkan dapat tercapai.

**b. SASARAN2: Tersedianya Kawasan Permukiman yang Memadai/ Berkualitas.**

Sasaran No 2 tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu:

**a. Persentase Kawasan Permukiman yang Berkualitas**

**Tabel Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 2 Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi Tahun sebelumnya		Target akhir renstra	Sumber Data
						2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Kawasan Permukiman Yang Berkualitas	%	29,99	36,39	100	0%	32,5%	80,70%	Laporan
RATA-RATA %					100	KRITERIA tahun 2025: SANGAT TINGGI			

Dari tabel diatas Berikut kami jabarkan realisasi indikator sasaran tersedianya kawasan permukiman yang memadai/ Berkualitas yang ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025. Sementara di tahun

sebelumnya pada tahun 2024 capaian penanganannya mencapai 0,40% dari target 1,23% atau sekitar 32,5% pencapaian target ini masih rendah disebabkan fokus penanganan pada tahun ini lebih ditekankan pada pendataan ulang terhadap permukiman kumuh, sehingga akurasi data akan mempengaruhi tepatnya sasaran dalam penanganan pada tahun berikutnya, dan Pada Tahun 2025 capaiannya sebesar 36,39 % dengan indikator baru Persentase Kawasan Permukiman Berkualitas, indikator ini tidak hanya Menekankan Pada Peremajaan/Pemugaran Kawasan Kumuh, Tetapi Menyasar Penyediaan PSU (Prasaran, Sarana, dan Utilitas Umum) Pada Kawasan Permukiman. Sehingga walaupun belum ada Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2025, indikator ini tetap mencapai target karena Penyediaan PSU Permukiman yang cukup Signifikan.

Berdasarkan SK Bupati Lombok Tengah Nomor 384.a Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Lombok Tengah, Luas permukiman kumuh sebesar 815,37 Ha yang berada di 41 lokasi. Adapun Upaya yang dilakukan dinas perumahan dan kawasan Permukiman untuk penuntasan Kawasan permukiman kumuh ialah terus berkoordinasi dengan pihak lain guna mendapatkan anggaran untuk penanganan selain itu kami juga terus memperbarui basis data luasan Kawasan kumuh guna mempertajam sasaran penanganan.

berikut daftar permukiman kumuh tahun 2025:

No	Lokasi Kawasan Kumuh	Luas (Ha)
1	Prapen dan serengat selatan	16,76
2	Semayan	2,25
3	Perbawe	2,60
4	Leneng dan Handayani	7,42
5	Kemulah	2,31
6	Wakul	2,92
7	Ketejer	4.42
8	Lok dan Gubuk alang	16,60

9	Montong Gamang	25,11
10	Enjer	15,50
11	Kuta Dua	5,23
12	Rangkap Dua dan Ngolang	17,18
13	Sokat	14,99
14	Awang	20,74
15	Penyalun, Kukun, Rebuk 1 & Rebuk2	15,22
16	Lentek Satu dan Lentek Dua	9,49
17	Gerupuk	23,98
18	Ketiwung, Montong dan Begum	23,02
19	Baturiti, Tumpak Satu, Mawun dan Are Guling	81,93
20	Pancor	25,97
21	Bongak dan Bunlesung	6,00
22	Bile Tengah	18,84
23	Kampung Nelayan	1,30
24	Rujak Praya	7,99
25	Rujak Tengah	9,01
26	Dasan Baru Kapal dan Terake	22,61
27	Aur Manis	4,77
28	Kelongkong	2,29
29	Tanak Awu	15,38
30	Jomang, Kebontun, Batulang, Belong, Ketangge, dan Gabah	44,65
31	Bagean dan Mentor	50,79
32	Adong, Krangi dan Tongkek	21,49
33	Piang	9,84
34	Dusun Selak	3,23
35	Ketare	51,10
36	Mujur	23,00
37	Beleka	56,61
38	Labulia, Sulin dan Pande	40,80
39	Bun Sumpak	32,53
40	Ceret, Seganteng, Keren, Rajumas dan Jantuk	28,00
41	Pancor Dao	17,30
42	Pemepek	14,20
<b>Total</b>		<b>815.37</b>

**c. SASARAN 3: Tersedianya Tanah dan Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Umum.**

Sasaran No.3 tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu:

- a. Persentase Penyediaan tanah dan lahan untuk pembangunan fasilitas umum

**Tabel Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 3 Tahun 2025.**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi Tahun sebelumnya		Target akhir renstra	Sumber Data
						2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Penyediaan tanah dan lahan untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	100	100	100	100	Laporan
RATA-RATA %					100	KRITERIA tahun 2025: SANGAT TINGGI			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran Tersedianya tanah dan lahan yang sesuai dengan kriteria untuk pembangunan fasilitas umum dengan indikator penyediaan tanah dan lahan untuk pembangunan fasilitas umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menghasilkan capaian kinerja sebesar 100 % dengan kriteria sangat Baik. Pada tahun 2023 dan 2024 capaian penyediaan tanah dan lahan untuk pembangunan fasilitas dikarenakan target untuk penyediaan tanah dan lahan sesuai dengan kebutuhan yang ada sehingga realisasi menjadi maksimal.

### III.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja pencapaian Tujuan Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

Dalam melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja tujuan strategis dinas perumahan dan kawasan permukiman tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan setiap pencapaian dengan target yang ditentukan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berikut kami sampaikan tabel Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025:

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH</b> <b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b> <small>Jalan Gajah Mada No.103-Praya</small>									
CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025									
NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Keluarga Miskin	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Perumahan	1 Dokumen			
				Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana dan Masyarakat yang terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi dan Terbangun	4 Unit Rumah	4 Unit Rumah		
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	4 Unit Rumah	4 Unit Rumah		
				Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Pengelolaan/pemeliharaan Rumah Susun Umum dan atau rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah pengelolaan/pemeliharaan Rumah Susun Umum dan atau rumah Khusus	1 unit	1 unit		

				<b>Program Kawasan Permukiman</b>	<b>Penurunan Luasan Kawasan Kumuh</b>	10 Ha	0		
				Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Kawasan Permukiman kumuh yang tertangani	10 Ha	0	Tidak ada anggaran untuk Peremajaan Kawasan Kumuh	Mencari Sumber Anggaran Lain
				Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki	306.Unit			
				Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh Yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan /Dipugar	10 Ha	0	Tidak ada anggaran untuk Peremajaan Kawasan Kumuh	Melakukan pendekatan agar kebijakan anggaran lebih memprioritaskan isu kekumuhan dengan mitra- mitra kerja yang terkait dengan penanganan kawasan kumuh seperti; Komisi III DPRD Kab. Loteng, dan BPPW.
			Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman	<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>	<b>Persentase Kawasan Permukiman (lingkungan/dusun) yang terfasilitasi PSU</b>	5,48%			
				Kegiatan urusan penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU yang Terbangun di kawasan permukiman (jalan lingkungan, drainase, PUJ permukiman, RTH (Ruang Terbuka Hijau)	5,48%	12,63%		
				Sub Kegiatan Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	200 Lokasi	271 Lokasi		
2	URUSAN PERTANAHAN		Penyediaan Tanah/Lahan untuk Infrastruktur Publik	<b>Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan</b>	<b>Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan</b>	100%			
				Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pembebasan Lahan	1 Lokasi	1 Lokasi		
				Kordinasi dan sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pembebasan Lahan	1 Lokasi	1 Lokasi		
				<b>Program Penatagunaan Tanah</b>	<b>Dokumen penatagunaan tanah</b>	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Koordinasi Pemetan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				<b>Program Pengelolaan Tanah Kosong</b>	<b>Persentase permukiman baru yang terbangun</b>	100%			
				Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Lokasi Penataan Kawasan baru	0 Lokasi	0 Lokasi		
				Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Lokasi Penataan Kawasan baru	0 Lokasi	0 Lokasi		

### III.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.4**  
**Anggaran dan Realisasi Tahun 2025**

NO	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	54.757.500.221,95	54.367.384.246	99,29
2	Belanja Modal	5.123.758.332	5.084.136.952	99,23
	Jumlah	59.881.258.553,95	59.451.521.198	99,28

Penyerapan anggaran belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 sebesar 99,28% dari anggaran belanja operasi 99,29% dan belanja langsung Modal 99,28%. Dari realisasi anggaran di atas menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah sangat baik atau lebih dari 91%.

Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan, berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu organisasi perangkat daerah, selain itu efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran juga menjadi prinsip kami dalam mengelola anggaran, sehingga bisa mencapai good governance dan pemerintahan yang akuntabel.

Berikut perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

**Tabel III.5**  
**Perbandingan realisasi Anggaran dan Realisasi kinerja Tahun 2024**

Kinerja						Keuangan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Target	Realisasi	%
1	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni	67,81%	68,48 %	100	-Program Kawasan Permukiman - Program Pengembangan Perumahan	7.589.441.264	7.530.730.240	99,23
2	Tersedianya Kawasan Permukiman Yang Berkualitas	Persentase Kawasan Permukiman yang Berkualitas	29,99 %	36,39%	100	- Program Kawasan Permukiman -Program Peningkatan PSU (Prasaran, Sarana dan Utilitas Umum)	41.983.508.012	41.871.062.253	99,73
3	Tersedianya tanah dan lahan untuk pembangunan fasilitas umum	Persentase Penyediaan Tanah dan Lahan untuk pembangunan fasilitas umum (%)	100 %	100	100	Program Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	1.443.185.511	1.405.224.322	97,43

Berdasarkan data dalam tabel diatas secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama Tahun 2025 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam rangka menindaklanjuti amanat pertauran perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan PERMEN PAN No. 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bentuk pertanggung jawaban lembaga penyelenggara negara baik di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah diwajibkan setiap tanunnya untuk menyusun Laporan Penetapan Kinerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah merampungkan penyusunan LKj-IP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025. LKj-IP dimaksud merupakan evaluasi kinerja terhadap masing-masing unit kerja/bagian dalam penyelenggaraan Tupoksinya sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD.

LKJ IP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 ini, merupakan evaluasi menyeluruh terhadap aspek pengukuran kinerja kegiatan, pengukuran pencapaian sasaran dan realisasi anggaran dari pelaksanaan program/kegiatan dimana penyelenggaraan program/kegiatan yang dimaksud merupakan penjabaran visi, misi dan strategi organisasi sebagaimana tertuang dalam rencana jangka menengah Pemerintah Daerah 2025-2029. Berdasarkan pengkajian terhadap ketiga aspek tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah Tahun anggaran 2025 dikategorikan "SEDANG", Namun demikian berdasarkan permasalahan yang ada maka kedepan perlu dilakukan peningkatan terhadap kualitas penyelenggaraan program/kegiatan melalui peningkatan koordinasi penyusunan program/kegiatan

dan anggaran, peningkatan kualitas SDM aparatur, peningkatan koordinasi terhadap satuan kerja maupun stakeholder terkait untuk mencapai dayaguna dan hasil guna yang optimal dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

Tabel 4.1 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Indikator	Capaian Tahun 2025			Kriteria
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni	67,81	68,48	100	Baik
2	Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	29,99	36,39	100	Baik
3	Persentase Pemenuhan lahan untuk pembangunan fasilitas umum	100	100	100	Baik
	Rata-rata capaian indikator program				TINGGI

#### A. LANGKAH PERBAIKAN

Dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka ada beberapa langkah perbaikan yang akan dilakukan antara lain :

1. Koordinasi dengan pihak terkait di internal pemerintah dalam rangka peningkatan anggaran yang mengarah pada peningkatan capaian pengurangan luasan kawasan kumuh maupun penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Lombok Tengah,
2. Membuat inovasi-inovasi dalam rangka mengundang pihak swasta dapat terlibat dalam program penanganan rumah tidak layak huni maupun program penataan lingkungan,

3. Peningkatan efektivitas rapat koordinasi diinternal dinas dalam rangka pemantauan target capaian kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 kami buat. Kami menyadari bahwa Laporan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, masukan, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan. Semoga LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

**Praya , Januari 2026**  
**Kepala Dinas,**

**MUHAMMAD SUPRIADDIN, ST.**  
**NIP. 197512212008011013**